



KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2022





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2022

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.



Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 45.435 NIE, pemeriksaan di 5.235 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 9.990 sampel, 64 perkara, dan 138 kegiatan pelaksanaan KIE. Tahun 2022 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM semakin intensif dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2022. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 7 Juni 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dr. Penny K. Lukito, MCP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	5
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	10
III. Standardisasi	10
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan	12
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	13
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	15
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik.....	22
VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan	28
IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	30
X. Kerjasama Internasional	32
XI. Sumber Daya Manusia	34
XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I 2022	35
XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	36
PENUTUP	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	6
Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)	7
Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	7
Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan	8
Gambar 8. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	8
Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan	9
Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping.....	9
Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari – Maret 2022) ..	10
Gambar 12. Grafik Baku Pembanding yang dikembangkan (Januari – Maret 2022)	13
Gambar 13. Data Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi	13
Gambar 14. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media.....	15
Gambar 15. Pertumbuhan Audiens per Platform pada Triwulan I 2022	16
Gambar 16. Engagement Media Sosial Badan POM	16
Gambar 17. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan I.....	17
Gambar 18. Tabel Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama Triwulan I 2022	18
Gambar 19. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan I 2022.....	18
Gambar 20. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022.....	19
Gambar 21. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi	20
Gambar 22. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media	21
Gambar 23. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi	21
Gambar 24. Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	22
Gambar 25. Tampilan Menu Pengajuan SMKPO pada aplikasi e-sertifikasi Badan POM	23
Gambar 26. Tampilan Form Pengajuan SMKPO	23

Gambar 27. Pelaporan Vaksin, dengan sumber data dari PT Bio Farma dan Aplikasi SMILE – Kementerian Kesehatan24

Gambar 28. Aktivitas dalam percepatan implementasi 2D Barcode25

Gambar 29. Aktivitas pada Badan POM Mobile26

Gambar 30. Sosialisasi SIPT Tahun 2022 Tahap27

Gambar 31. Realisasi Anggaran s.d Triwulan I 202235



BADAN POM **HIGHLIGHT**

S.D TRIWULAN I TAHUN 2022

Tingkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium, Badan POM Terapkan Sistem Regionalisasi Laboratorium

Yogyakarta, Ju'mat (14/01/2022)



Pada tahun 2022, Badan POM berfokus melaksanakan sistem manajemen baru yaitu regionalisasi laboratorium sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pengujian. Sebagai persiapan implementasi sistem tersebut, Badan POM menyelenggarakan “Rapat Pembahasan Regionalisasi Laboratorium”. Rapat yang diselenggarakan secara *hybrid* tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja Badan POM pusat dan daerah.

Kepala Badan POM membuka kegiatan rapat tersebut dan menjelaskan bahwa regionalisasi laboratorium merupakan pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian. “Tujuan regionalisasi laboratorium adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium Badan POM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan,” jelasnya.

Pasca Penerbitan EUA, Badan POM Beri Izin Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin Buatan Dalam Negeri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Jogja

Kepala Badan POM meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi *booster* COVID-19 untuk lansia dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Yogyakarta di Jogja Expo Center. Vaksinasi *booster* kali ini menggunakan vaksin AstraZeneca yang didistribusikan oleh Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) Provinsi DI Yogyakarta.

Kepala Badan POM beserta jajaran menyaksikan proses vaksinasi *booster* untuk memastikan vaksin yang digunakan memenuhi keamanan, khasiat, dan mutunya. Badan POM melalui Balai Besar POM (BBPOM) di Yogyakarta telah melakukan pengawasan penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sebagai serangkaian penanganan vaksin COVID-19 di lapangan.

Yogyakarta, Sabtu (15/01/2022)



Badan POM Beri Izin Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin Buatan Dalam Negeri

Jakarta, Senin (07/02/2022)



Badan POM resmi menerbitkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Universitas Airlangga (UNAIR) bersama PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia (PT Biotis). Pemberian izin ini merupakan pertama kalinya untuk vaksin COVID-19 karya anak bangsa. Kepala Badan POM Penny K. Lukito menyerahkan PPUK Vaksin Merah Putih kepada Peneliti UNAIR, Prof. Fedik Abdul Rantam dan Direktur PT Biotis, FX Sudirman.

Penyerahan ini dilakukan dalam Konferensi Pers secara daring, yang dihadiri Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development UNAIR, Prof. Ni Nyoman Tri Puspaningsih; Peneliti UNAIR, Prof. Fedik Abdul Rantam; Peneliti Utama Uji Klinik, Dominicus Husada beserta Tim Uji Klinik RSUD Dr Soetomo; Direktur Utama PT Biotis, FX Sudirman; Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Pretty Multihartina; serta media lokal dan nasional.

Konsisten Terapkan SAKIP, Tingkatkan Nilai Kinerja Badan POM

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaran SAKIP di Badan POM dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari level Satuan kerja, unit organisasi, sampai dengan level Badan POM. Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan POM menggelar diskusi bertema Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM. Kegiatan ini berlangsung *daring* dan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Erwan Agus Purwanto.

Dalam pembukaanya Erwan menjelaskan bahwa forum ini sangat penting karena merupakan tahapan terakhir evaluasi sehingga Badan POM mendapat rekomendasi predikat nilai A untuk penerapan SAKIP. "Kita ingin melihat secara langsung dan gambaran lebih nyata tentang bagaimana Badan POM mengelola manajemen kinerja yang kemudian dikembangkan menjadi SAKIP," ungkap Erwan

Jakarta, Rabu (16/02/2022)



Tindak Lanjuti Pengaduan Masyarakat, Badan POM Ungkap Produksi dan Peredaran Produk Ilegal

Jakarta, Selasa (22/02/2022)



Badan POM menggelar Konferensi Pers secara *offline* dan *online (hybrid)* terkait hasil operasi penindakan pada produksi dan peredaran produk ilegal, Berawal dari laporan/pengaduan masyarakat terhadap penjualan produk pangan olahan mengandung BKO secara *online* serta pengembangan kasus penjualan bahan baku obat ilegal, Badan POM segera melakukan penelusuran lapangan dan menggelar operasi penindakan yang berhasil mengungkap adanya sarana ilegal yang memproduksi dan mengedarkan pangan olahan dan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor.

Dari operasi tersebut, Badan POM menemukan produk jadi berupa 15 jenis (5.791 pcs) pangan olahan mengandung BKO dan 36 jenis (18.212 pcs) obat tradisional mengandung BKO dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Barang bukti pangan dan obat tradisional mengandung BKO yang ditemukan antara lain Kopi Jantan, Kopi Cleng, Kopi Bapak, Spider, Urat Madu, dan Jakarta Bandung. Selain itu, Badan POM juga menemukan bahan produksi dan bahan baku obat ilegal mengandung BKO berupa Parasetamol dan Sildenafil, bahan campuran setengah jadi, cangkang kapsul, dan aneka jenis bahan kemas, serta alat produksi sederhana.

Badan POM Sinergikan Kerja Sama Obat dan Makanan di Perbatasan Kaltara

Perkuat garda terdepan di perbatasan, Badan POM melakukan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pengawasan obat dan makanan terpadu. Momentum kerja sama juga diiringi dengan peresmian secara langsung Balai POM di Tarakan yang sebelumnya termasuk dalam klasifikasi Loka POM. Peningkatan klasifikasi Balai POM di Tarakan merupakan wujud nyata komitmen Badan POM dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah perbatasan.

Tarakan, Kamis (24/03/2022)



Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan POM, Penny K. Lukito menceritakan bahwa salah satu tantangan yang memerlukan peningkatan kinerja pengawasan adalah wilayah geografis Kaltara. "Wilayah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia di sebelah utara dan barat, yang mana rentan terhadap pemasukan produk ilegal." Ujarnya.



BADAN POM

HASIL KEGIATAN

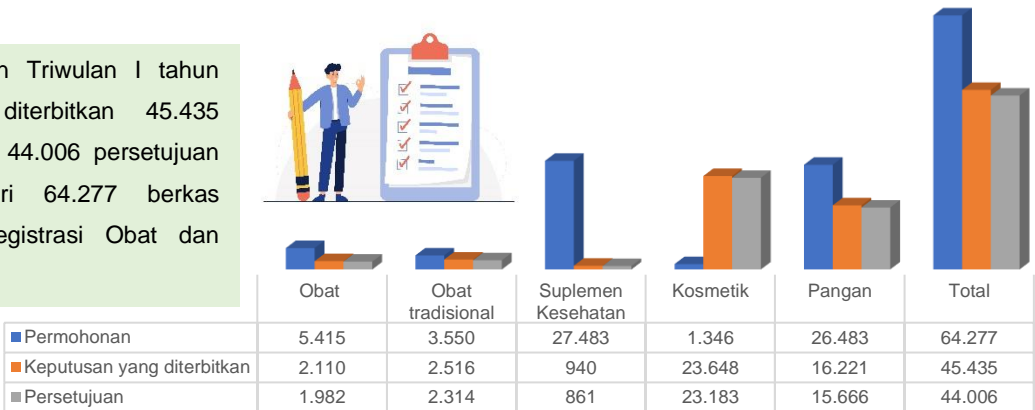
**PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
S.D TRIWULAN I TAHUN 2022**

I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan pre-market

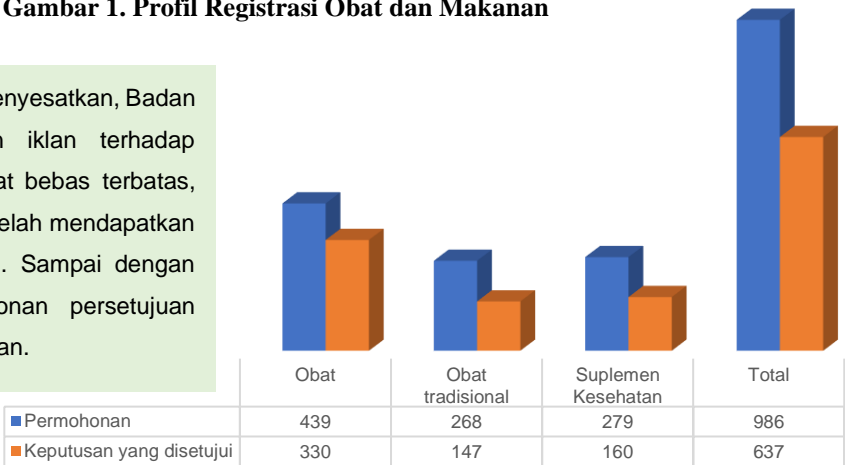
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022, telah diterbitkan 45.435 keputusan dan 44.006 persetujuan izin edar dari 64.277 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2022, dari 986 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 637 (64,60%) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

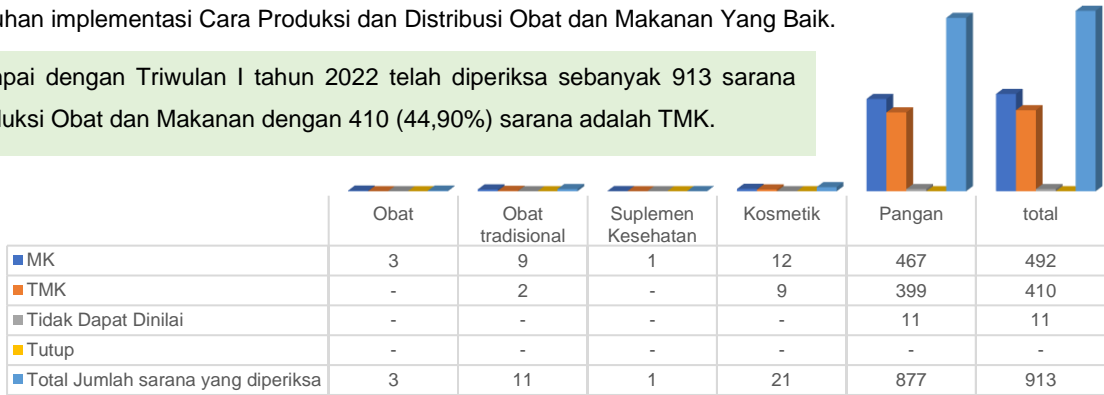
Pengawasan post-market

Pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

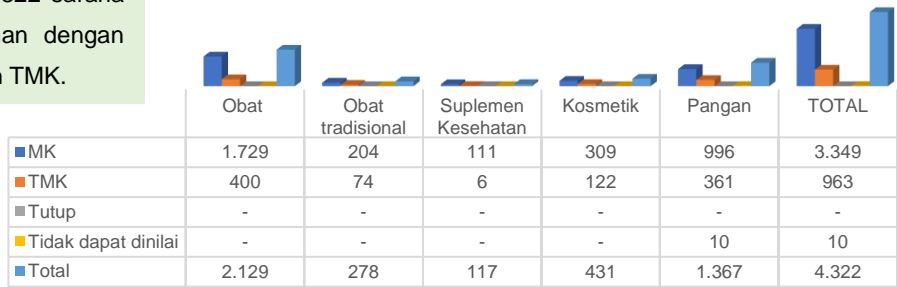
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 telah diperiksa sebanyak 913 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 410 (44,90%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 telah diperiksa sebanyak 4.322 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 963 (22,28%) sarana adalah TMK.



Keterangan:

TMK = Tidak Memenuhi

MK = Memenuhi Ketentuan

Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan



A. Targeted

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Ilegal/Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Targeted	629	1	1	0	24	627	300	289	11	13	327	302
Obat tradisional	Targeted	960	0	0	0	106	960	522	451	71	71	438	522
kuasi	Targeted	11	0	0	0	0	11	4	4	0	0	7	4
Suplemen Kesehatan	Targeted	288	0	0	0	18	288	114	97	17	17	174	114
Kosmetik	Targeted	1.798	0	0	0	439	1.798	781	574	207	207	1.017	781
Rokok	Targeted	165	0	0	0	14	165	15	15	0	0	150	15
Pangan	Targeted	1.088	0	0	0	79	1.088	582	513	69	69	506	582

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022, dari 4.939 sampel targeted yang disampling terdapat 2.320 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 377 (16,25%) sampel tidak memenuhi syarat.

B. Random

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Ilegal/Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	3.233	1	1	0	139	3.231	1.674	1.622	52	54	1.557	1.676
Obat tradisional	Random	2.165	6	0	0	275	2.159	1.185	991	194	200	974	1.191
kuasi	Random	80	0	0	0	5	80	62	61	1	1	18	62
Suplemen Kesehatan	Random	602	0	0	2	47	600	337	302	35	37	263	339
Kosmetik	Random	4.320	8	0	0	1.160	4.312	2.417	1.786	631	639	1.895	2.425
Pangan	Random	3.591	0	1	0	338	3.590	1.976	1.769	207	208	1.614	1.977

Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Keterangan:

MS = Memenuhi SyaratMK

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

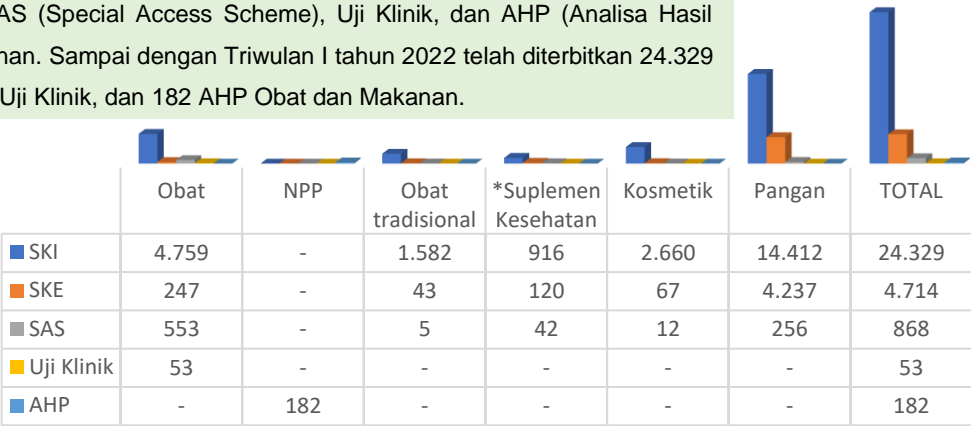
TiE = Tanpa izin Edar

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022, dari 13.991 sampel random yang disampling terdapat 7.670 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 1.139 (14,85%) sampel tidak memenuhi syarat.

* Sumber data: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan I 2022

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 telah diterbitkan 24.329 SKI, 4.714 SKE, 868 SAS, 53 Uji Klinik, dan 182 AHP Obat dan Makanan.

Sertifikasi

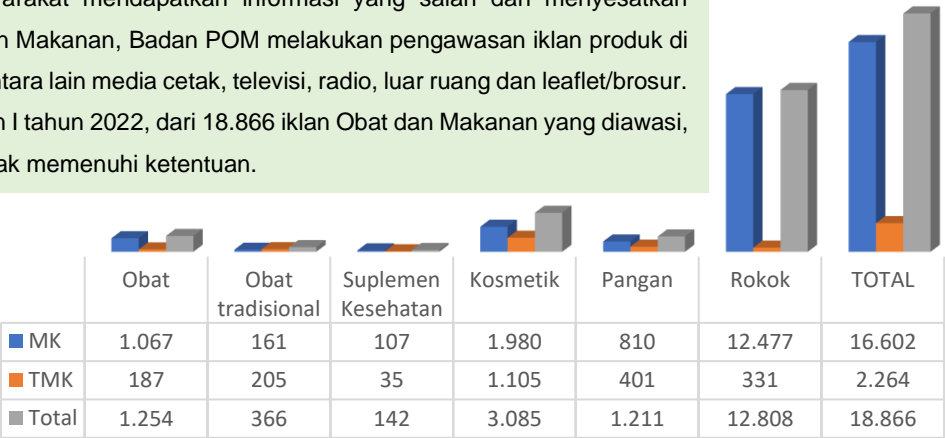


Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

* Termasuk Kuasi

Pengawasan iklan

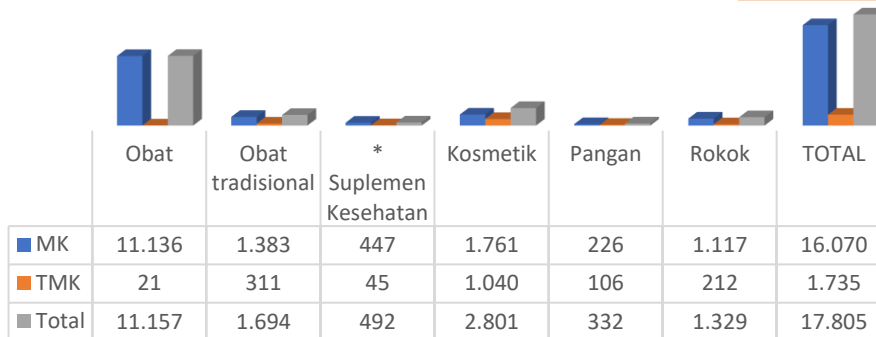
Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan I tahun 2022, dari 18.866 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 2.264 (12,00%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 8. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan I tahun 2022, dari 17.805 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 1.735 atau sekitar 9,74% label tidak memenuhi ketentuan.

Pengawasan



Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

* Termasuk Kuasi

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)



	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjuti	%
Obat	2.412	1.795	74,42
Obat Tradisional	9	9	100,00
Suplemen Kesehatan	11	11	100,00
Kosmetik	228	224	98,25

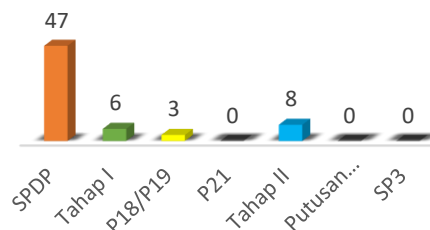
Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

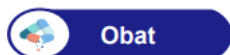


Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari – Maret 2022)

Sampai dengan triwulan I tahun 2022, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 64 perkara. Sebanyak 47 perkara masih dalam tahap SPDP, 6 perkara pada tahap I, 3 perkara pada tahap P18/19, dan 8 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap II).

III. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.



Pada tahun 2022 terdapat 11 peraturan/standar/pedoman obat yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan selama triwulan I sebagai berikut:

1. Standar Obat Non Kompendial (50%).
2. Standar Mutu Produk Biologi dan Produk Radiofarmaka (66,67%).
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Pelulusan Bets/Lot Release Vaksin dan Produk Darah (28,57%).
4. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Risiko Keberadaan Nitrosamin dalam Obat dan Bahan Obat (42,86%).
5. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Penilaian Produk Inhaler dan Nasal (28,57%).
6. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Penilaian Spesifikasi Kemasan Obat (28,57%).

7. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Informatarium Obat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia Edisi 4 (33,33%).
8. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (85,71%).
9. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (100%).
10. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengawasan Produk Tembakau (28,57%).
11. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Teknis Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Produksi, Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian (14,29%).



Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Terdapat 9 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sedang dalam proses penyusunan. Berikut 9 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan selama triwulan I:

1. Petunjuk teknis pelaksanaan penerapan aspek CPOTB secara bertahap (25%).
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional (Lampiran) (25%).
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (25%).
4. Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (25%).
5. Pedoman Uji Klinik Suplemen Kesehatan (40%).
6. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (10%).
7. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (25%).
8. Rancangan Perubahan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (25%).
9. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Parfum Isi Ulang (80%)

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 130 kajian. Pada triwulan I telah diselesaikan sebanyak 19 kajian dari targetsebanyak 25 kajian. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.



Pangan

Terdapat 10 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 10 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan selama triwulan I sebagai berikut:

1. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 (Lampiran III - V) (40%).
2. Penyusunan *Code of Practices* untuk mereduksi 3-monochloropropane-1,2- diol esters (3-MCPDE) dan glycidyl esters (GE) dalam Minyak Goreng Sawit (8%).
3. Penyusunan Pedoman Pengkajian Bahan Tambahan Pangan (30%).
4. Penyusunan Revisi Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan (20%).
5. Penyusunan Rancangan Perubahan Kedua Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (20%).
6. Penyusunan Pedoman Iklan Pangan Olahan (8%).
7. Penyusunan Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi (28,57%).
8. Penyusunan Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah untuk UMKM (28,57%).
9. Penyusunan Revisi Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik (Pangan Siap Saji Terkemas) (8%).
10. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Jenis Mikroorganisme yang Digunakan pada Pangan Olahan (20%).

Selama triwulan I telah diselesaikan 51 kajian. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 9 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan Badan POM pada tahun 2022 dengan progres triwulan I sebagai berikut:

1. Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Mendukung Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2022 (27%).

2. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro Kecil (UMK) Obat Tradisional menggunakan pemodelan *System Dynamic* (16%).
3. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment Center* (INARAC) (63%).
4. Penyediaan Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan (25%).
5. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 (32%).
6. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 (30%).
7. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (35%).
8. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2022 (48%).
9. Evaluasi Penerapan 2D *Barcode* dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan (35%).

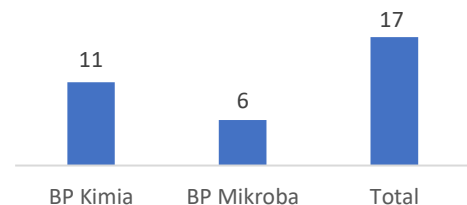
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis (MA) yang dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis (MA) dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Pada tahun 2022, Badan POM menargetkan pengembangan 200 MA. Sampai dengan triwulan I, telah dikembangkan 26 judul MA.

2. Baku Pembanding yang dikembangkan

Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Pada triwulan I tahun 2022 telah dikembangkan 17 baku pembanding (BP) terdiri dari 11 BP kimia dan 6 BP mikroba.



Gambar 12. Grafik Baku Pembanding yang dikembangkan (Januari – Maret 2022)

3. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, yaitu dengan pemenuhan *timeline* pengujian sampel Obat dan Makanan.

Target persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh laboratorium Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) adalah 93%. Sampai dengan triwulan I tahun 2022, terdapat 409 sampel yang diterima oleh laboratorium PPPOMN. Seluruh sampel tersebut telah selesai uji sesuai dengan ketentuan *timeline* (realisasi 100%). Oleh karena itu, capaian dari indikator ini pada triwulan I sebesar 107,53%.

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang dikalibrasi sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar. Sampai dengan triwulan I tahun 2022, telah dilakukan kalibrasi peralatan laboratorium sebanyak 768 alat.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

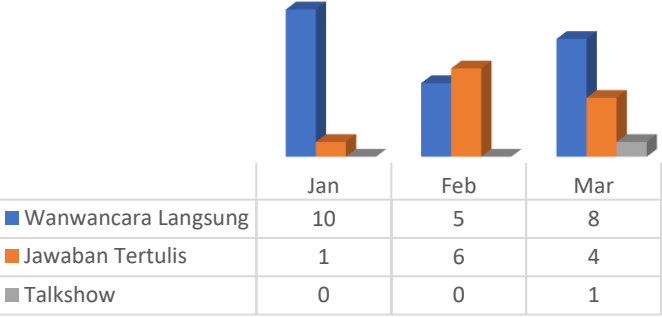
Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM dan laboratorium non-Badan POM sesuai lingkup pengujian/ keahlian. Pada tahun 2022, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 10 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan I tahun 2022, Badan POM telah berpartisipasi dalam 1 (satu) jejaring yaitu Jejaring *Asean Pharmaceutical Testing Laboratory Committee* (APTLC).

6. Pengujian Sampel Spesimen Covid-19

Di masa pandemi, Badan POM berkontribusi dalam pengujian sampel spesimen Covid-19 yang dilakukan di Laboratorium *Biohazard* PPPOMN. Pada triwulan I tahun 2022, jumlah spesimen Covid-19 yang diuji sebanyak 9.985 spesimen. Pada tahun 2022, Badan POM bergabung dalam jejaring pengujian *Whole Genome Sequencing* (WGS), dimana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran mutasi virus Covid-19. Dari 445 sampel yang diuji WGS selama triwulan I, sebagian besar sampel merupakan varian Omicron.

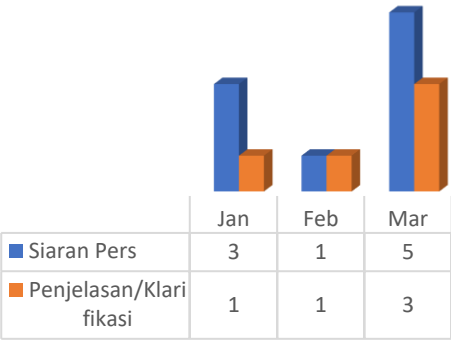
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Pada triwulan I tahun 2022, Badan POM telah menerbitkan 9 siaran pers dan 5 penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Selama Januari – Maret 2022, penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan Maret yaitu sebanyak 5 terbitan, sedangkan penjelasan/klarifikasi paling banyak dipublikasikan di bulan Maret yaitu 3 penjelasan. Pada triwulan ini, bahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, OTSKK (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik), pangan olahan, dan umum/kinerja. Namun sepanjang triwulan I tahun 2022, topik yang paling sering dibahas dalam siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berasal dari komoditas obat. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.



Gambar 14. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media

media massa. Tercatat sudah 25 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM selama periode triwulan I tahun 2022. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan adalah sebanyak 40 kegiatan, baik yang terselenggara di dalam kota maupun di luar kota. Sebagai informasi, tidak seluruh peliputan kegiatan Badan POM dijadikan berita aktual.



Gambar 13. Data Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi

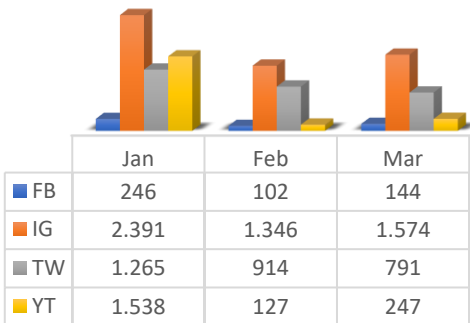
Selama triwulan I tahun 2022, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media, berupa wawancara/talkshow serta pemberian jawaban tertulis. Dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan adalah 23 wawancara langsung, 11 jawaban tertulis dan 1 *talkshow*.

Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang

dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui *website* resmi Badan POM dan disebarakan kepada

Pada triwulan I tahun 2022, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube memiliki rata-rata unggahan 2-3 unggahan per hari. Platform Twitter adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 548 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 241 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 128 unggahan, serta Youtube sebanyak 31 unggahan.

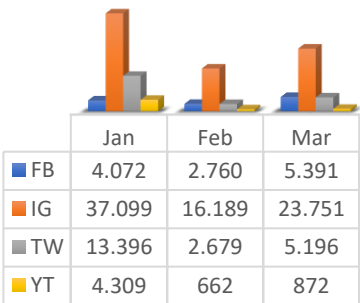
Secara garis besar, total unggahan periode Januari sampai dengan Maret 2022 di berbagai platform adalah 953 konten. Rincian jumlah unggahan per bulannya addalah 357 unggahan di bulan Januari, 224 unggahan di bulan Februari dan 372 unggahan di bulan Maret.



Gambar 15. Pertumbuhan Audiens per Platform pada Triwulan I 2022

Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung pada triwulan I tahun 2022 terhadap 4 platform media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan platform dengan total audiens/khalayak/pengunjung tertinggi di triwulan I ini dengan jumlah audiens/khalayak/pengunjung sebanyak 5.311 audiens, sementara di peringkat kedua ada platform Twitter dengan jumlah 2.970 audiens, dilanjutkan dengan Youtube dengan jumlah 1.912 audiens dan Facebook dengan 492 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada Januari, yaitu sebesar 5.440 audiens, disusul Maret 2.576 audiens dan Februari 2.489 audiens.

Pada triwulan I, engagement pada setiap platform cenderung fluktuatif. Engagement tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan jumlah 58.876, diikuti bulan Maret sebesar 35.210, dan Februari sebesar 22.290. Pertumbuhan jumlah engagement terlihat fluktuatif di 4 platform tersebut. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Januari karena adanya konten penempatan CPNS Badan POM, vaksin booster yang telah disetujui Badan POM, bolehkah membeli obat secara online, dan obat setelan. Sedangkan rendahnya engagement pada bulan Februari terjadi kemungkinan karena kurangnya isu-isu yang menarik perhatian audiens pada bulan tersebut.



Gambar 16. Engagement Media Sosial Badan POM

Top engagement content terkait Badan POM pada keempat platform dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 17. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada triwulan I



Pada triwulan I tahun 2022, pemberitaan terkait Obat dan Makanan dan Badan POM sebanyak 6.594 pemberitaan. Dari jumlah tersebut, berita netral sebanyak 3.687 pemberitaan dan berita positif sebanyak 2.904 pemberitaan dan berita

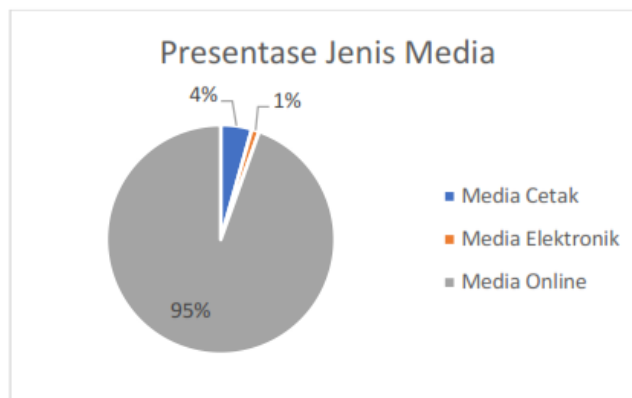
Bulan	Negatif	Netral	Positif	Total per Bulan
Januari		1.386	1.074	2.460
Februari	2	1.401	649	2.052
Maret	1	900	1.181	2.082
Total per Tonasi	3	3.687	2.904	6.594

Gambar 18. Tabel Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama Triwulan I 2022

Berdasarkan jenis media, media yang memberitakan terkait Obat dan Makanan lebih banyak terdapat di media *online* (95%), sedangkan media cetak sebanyak 4% dan media elektronik 1%.

Tahun 2022 diawali dengan pemberitaan penerbitan EUA vaksin *booster* bagi 5 vaksin COVID-19 yaitu CoronaVac atau Vaksin COVID-19 Bi Frama, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax. Kemudian pada bulan Februari Badan POM memberikan Persetujuan Pelaksanaan uji Klinis (PPUK) untuk Vaksin Merah Putih. Selanjutnya pada bulan Maret, Badan POM mengangkat isu penemuan Produk Kopi dan Jamu Berbahan Kimia Obat (BKO).

negatif sebanyak 3 pemberitaan. Artinya pemberitaan mengenai Obat dan Makanan secara umum dan Badan POM pada khususnya lebih banyak yang memeberitakan saja, tidak menyebutkan apresiasi pada Badan POM/menjadikan Badan POM sebagai rujukan. Sedangkan jika dilihat dari trennya, dibandingkan Januari dan Februari, pada Maret pemberitaan bertonasi positif lebih banyak dibandingkan tonasi netral.



Gambar 19. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan I 2022

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan*

Triwulan I Tahun 2022

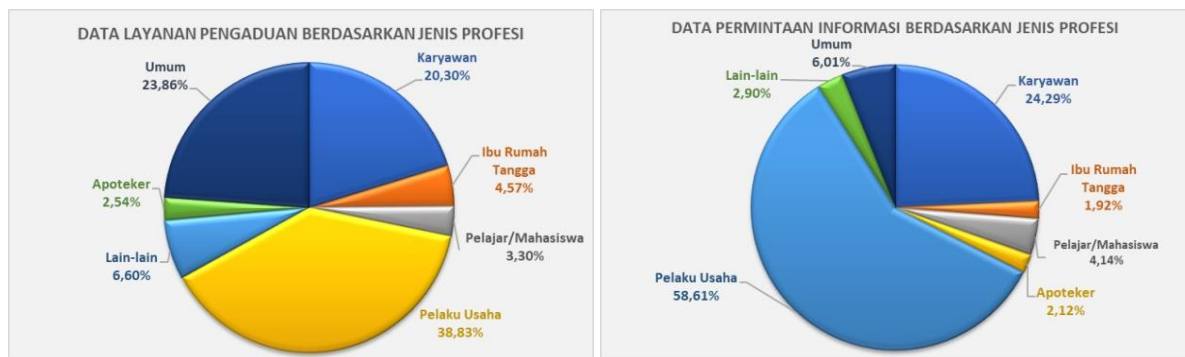


Gambar 20. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022

*KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi

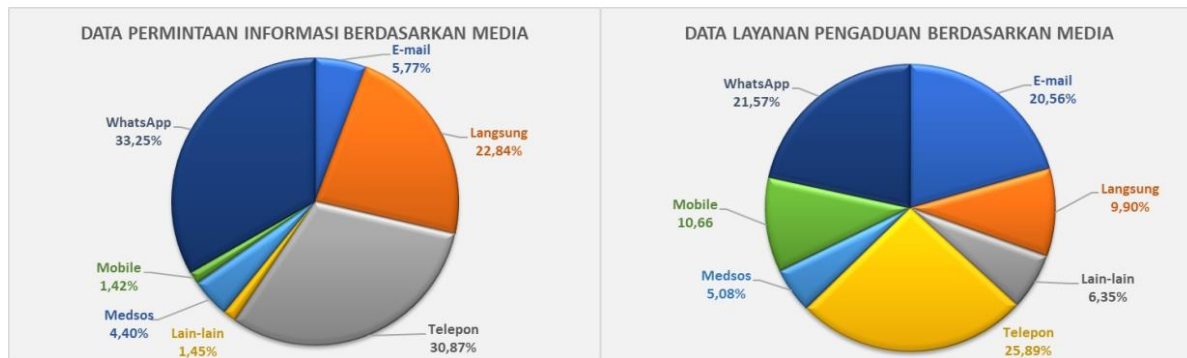
Pada triwulan I tahun 2022, terdapat 25 permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Topik permintaan informasi tersebut mengenai uji klinik dan keamanan vaksin Covid-19, EUA vaksin Covid-19, keamanan obat Remdesivir, sertifikat izin edar/surat keterangan terdaftar obat tradisional, dan peraturan tentang kategorisasi produk pangan olahan. Dari seluruh permintaan informasi tersebut, 20 (80%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 5 (20%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dengan alasan ada sebagian informasi yang termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan dan tidak dikuasai (dikuasai oleh instansi lain), dan tidak ada permintaan informasi yang ditolak. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian (tidak lebih dari 17 hari kerja), dengan rata-rata waktu penyelesaian layanan permintaan informasi yaitu 8,76 hari kerja. Sebanyak 22 (88%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 hari kerja, 3 (12%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 11-17 hari kerja.

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari-Maret tahun 2022, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta Contact Center HaloBADAN POM 1500533 sebanyak 13.995 layanan, terdiri dari 13.601(97,18%) layanan permintaan informasi dan 394 (2,82%) layanan pengaduan. Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 7.972 (58,61%) layanan dan karyawan sebanyak 3.304 (24,29%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 153 (38,83%) layanan dan masyarakat umum sebanyak 94 (23,86%) layanan.



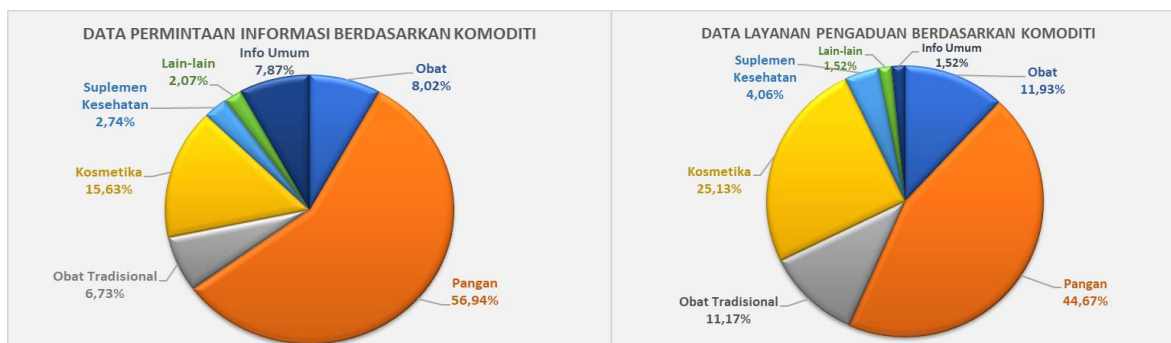
Gambar 21. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 4.522 (33,25%) layanan dan telepon sebanyak 4.199 (30,87%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui telepon sebanyak 102 (25,89%) dan aplikasi WhatsApp sebanyak 85 (21,57%) layanan.



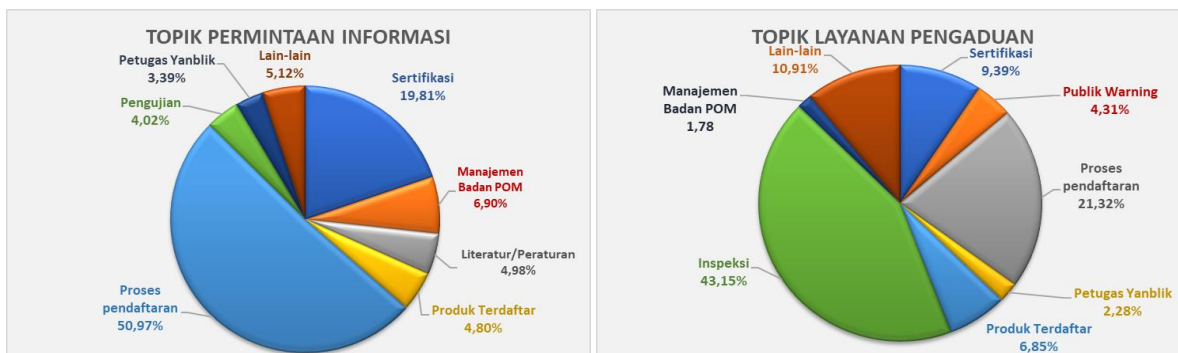
Gambar 22. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 7.744 (56,94%) layanan dan kosmetika sebanyak 2.126 (15,63%) layanan. Adapun komoditi yang banyak **diadukan** yaitu pangan sebanyak 176 (44,67%) layanan dan kosmetika sebanyak 99 (25,13%) layanan.



Gambar 23. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 6.933 (50,97%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 2.695 (19,81%%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain tentang penerimaan pegawai Badan POM, informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, proses sertifikasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) dan Surat Keterangan Impor dan Ekspor (SKI/SKE), peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, produk terdaftar, pengujian laboratorium, indikasi/khasiat, label halal, bahan tambahan pangan, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan yaitu tentang inspeksi sebanyak 170 (43,15%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 84 (21,32%) layanan.



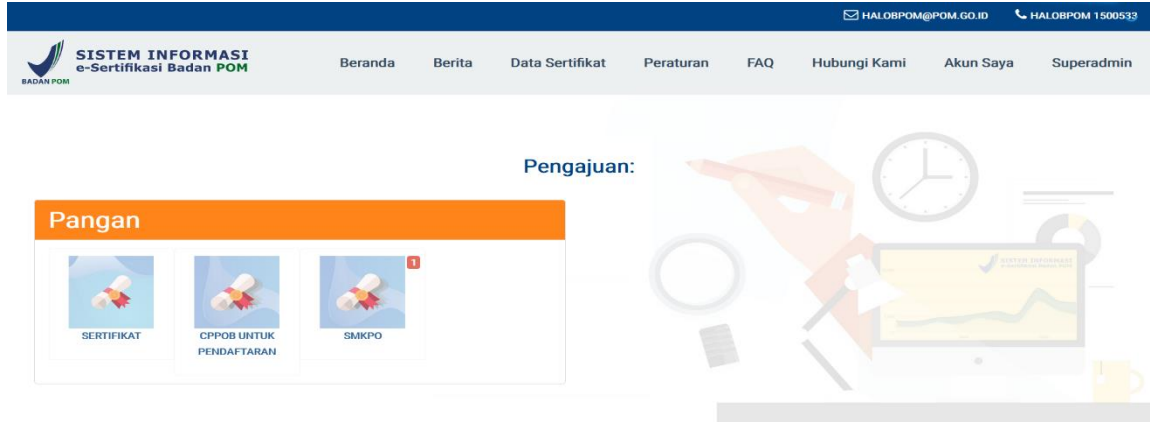
Gambar 24. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

VII. Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Pengembangan Aplikasi e-Sertifikasi

Pengembangan aplikasi e-Sertifikasi terus dilakukan guna mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi di Badan POM, salah satunya melalui pengembangan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan.

SMKPO merupakan pembaruan paradigma pengawasan, dari yang selama ini *watchdog control* (bergantung dari hasil pengawasan Badan POM), kini menjadi *proactive control*, yaitu pelaku usaha secara mandiri melaporkan hasil audit internalnya kepada Badan POM. Dengan dilakukan pengembangan pada Aplikasi e-Sertifikasi maka dapat memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan hasil audit internalnya kepada Badan POM.



Gambar 25. Tampilan Menu Pengajuan SMKPO pada aplikasi e-sertifikasi Badan POM

The screenshot displays the 'Pengajuan SMKPO' form. It is divided into several sections:

- Data Pendaftar:** Includes fields for No Pendaftaran (SMKPO02108-001), Nama Pendaftar (PT. ABC Text), Komoditas (Pangan), Jenis Sertifikasi (Makro/kecil), and Status (Sertifikasi).
- Sertifikat:** Shows the No pendaftaran (FW 5.04.25.1.54.541.04.22.0626) and a Download button.
- Audit Internal:** Contains a table for 'Data Perusahaan' with columns for No, File, and Tanggal. The first row shows 'Tgl Exp : 05 Oktober 2022'.
- Catatan:** A yellow box with three points: 1. Laporan Audit Internal, 2. Formulir yang terlampir dengan hasil audit, and 3. Maksimum ukuran dokumen yang diupload maksimum 30MB.

 The form also includes a 'Download' button at the bottom right.

Gambar 26. Tampilan Form Pengajuan SMKPO

2. Pengembangan Gateway Obat dan Vaksin

Menindaklanjuti kebutuhan pelaporan Obat dan produk EUA melalui *Gateway* Obat dan Vaksin, maka telah dilakukan pengembangan meliputi:

- Penambahan metode pengiriman data melalui API (*Application Program Interface*), agar PBF (Perusahaan Besar Farmasi) dapat secara langsung melaporkan penerimaan dan penyaluran produk.
- Pemisahan pelaporan data distribusi dari Sarana Pelayanan Kefarmasian dan PBF guna memudahkan proses pelaporan dan monitoring data, dikarenakan komposisi elemen data yang dilaporkan berbeda, dimana pada proses distribusi yang dilakukan oleh PBF diwajibkan melaporkan nomor batch, nomor faktur, pihak tujuan pengiriman dan alamat tujuan pengiriman.
- Memfasilitasi pelaporan PBF yang manual menjadi otomatis melalui API, yang selanjutnya data dapat dimanfaatkan oleh aplikasi e-Was dalam proses monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pegawasan Distribusi ONPP.

Dalam mendukung percepatan implementasi pelaporan distribusi via API, Pusdatin bersama unit kerja terkait melakukan *desk* konsultasi sebagai bentuk pendampingan implementasi system yang dilaksanakan via daring. Pelaporan pada *gateway* selama triwulan I sebagai berikut:

- Pelaporan Vaksin, dengan sumber data dari PT Bio Farma dan Aplikasi SMILE – Kementerian Kesehatan.



Gambar 27. Pelaporan Vaksin, dengan sumber data dari PT. Bio Farma dan Aplikasi SMILE – Kementerian Kesehatan

b. Pelaporan Obat

Kegiatan	Jumlah Data yang dilaporkan	Sumber Data
Pemasukan PBF dan Saryanfar	50.848 item	1 PBF (Marga Nusantara Jaya), 0 Saryanfar
Penyaluran oleh PBF	239.338 item	1 PBF (Marga Nusantara Jaya)
Penggunaan dan penyaluran oleh Saryanfar	0	0 Saryanfar

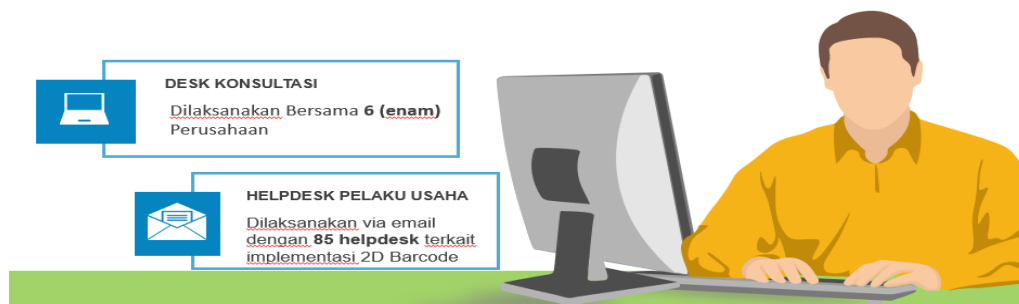
3. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Barcode)

a. Percepatan Implementasi



Dalam menghadapi pemalsuan Obat dan Makanan maka telah diimplementasikan pengawasan Obat dan Makanan berbasis digital dengan memberikan teknologi otentifikasi produk pada kemasan berupa 2D Barcode. Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat terlaksana jika tidak melibatkan seluruh lapisan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat. Percepatan implementasi 2D Barcode pada kemasan dilakukan dengan

strategi melakukan pendampingan implementasi kebijakan melalui media *desk* konsultasi tatap muka maupun via email (media lain) dan *helpdesk* teknis dan substansi melalui email ataupun sosial media lainnya tetap aktif dilakukan oleh Badan POM dengan capaian pada Triwulan I sebagai berikut:



Gambar 28. Aktivitas dalam percepatan implementasi 2D Barcode

b. BPOM Mobile

Pencantuman 2D Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan memberikan kesempatan partisipatif seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Dengan melakukan pemindaian (*scan*) 2D barcode menggunakan aplikasi BPOM Mobile, masyarakat dapat memverifikasi keaslian dan legalitas produk. Aplikasi BPOM Mobile dilengkapi menu lainnya yaitu cek NIE produk, pengaduan dan update berita Klarifikasi Badan POM. Masyarakat dengan mudah dapat melaporkan temuan produk ataupun pengaduan obat dan makanan dimanapun beradar tanpa harus mendatangi kantor Badan POM. Selain itu, BPOM Mobile wadah mencegah *hoax* dengan update berita ataupun klarifikasi seputar Obat dan Makanan.

Aktivitas kebermanfaatan BPOM Mobile pada Triwulan I 2022 sebagai berikut:



Penambahan user publik:
11.320 user

Aktivitas pindai/*scan* Barcode:
636.750 kali scan

Pengaduan masyarakat:
260 laporan

Pelaporan produk diduga substandard,
ilegal/palsu
oleh tenaga kesehatan : **0 laporan**

Gambar 29. Aktivitas pada Badan POM Mobile

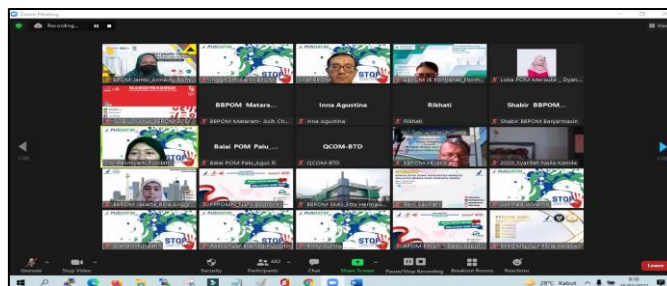
4. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012. Sistem ini mengalami pengembangan dan penyempurnaan setiap tahunnya mengikuti perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Beberapa penyempurnaan yang telah dilakukan pada tahun 2022 adalah:

- a. Perubahan alur SIPT menjadi hanya 1 alur untuk semua tipe UPT (penghapusan role Supervisor 2 dan Deputi MT).
- b. Integrasi form sampling dan penandaan menjadi 1 form sehingga bidang pengujian tidak perlu menunggu hasil penandaan.
- c. Implementasi SIPT Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD (Form 68) dan SIPT Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan (Form 69).
- d. Penerapan sampel regionalisasi ke seluruh UPT.
- e. Implementasi bertahap SIPT Sampling dan Pengujian:
 - 1) Implementasi alur sampling, mulai dari role operator mengentri data sampel sampai dengan role Tim Penerima Sampel (TPS) mengirim data ke Manajer Teknis (MT).
 - 2) Implementasi alur pada role MT dan Penyelia.

Terkait penyempurnaan tersebut, telah dilakukan beberapa sosialisasi:

- a. Sosialisasi SIPT Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan (Form 96) pada tanggal 8 Februari oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- b. Sosialisasi SIPT Tahun 2022 Tahap 1 pada tanggal 15 Februari 2022.



Gambar 30. Sosialisasi SIPT Tahun 2022 Tahap 1

VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2022, telah ditetapkan 6 (enam) Peraturan Badan POM, 30 Keputusan Kepala Badan POM, dan 19 Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 Rancangan Undang-Undang dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul Rancangan Undang-Undang

Rancangan undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.



3 Judul Rancangan Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

6 Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi.
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM.
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan POM.

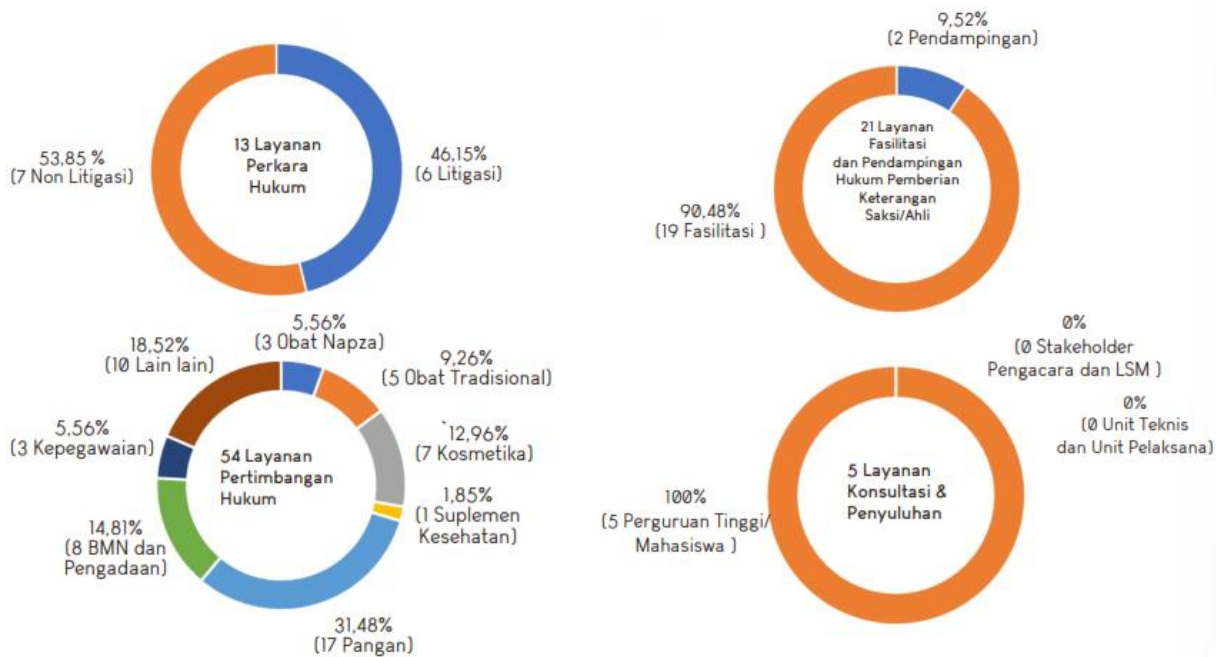
Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap instansi pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 93 layanan yang terdiri dari:



IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di UPT Badan POM. Sebagai bentuk perkuatan kelembagaan UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Badan POM meresmikan Balai POM di Tarakan pada tanggal 24 Maret 2022. Peresmian operasionalisasi Balai POM di Tarakan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, anggota Komisi IX DPR Daerah pemilihan Kalimantan Utara dan stakeholder terkait di Kalimantan Utara.

Dalam menindaklanjuti evaluasi kelembagaan Badan POM Tahun 2021, Badan POM mengusulkan adanya penataan organisasi dan tata kerja Badan POM dan telah dilakukan pembahasan dengan Kementerian PANRB pada tanggal 23 Februari 2022. Hasil pembahasannya adalah sebagai berikut:

- a. penambahan fungsi “penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi obat bahan alam Indonesia” pada Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
- b. perubahan penambahan fungsi “penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelayanan publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan” pada Biro Hukum dan Organisasi.
- c. pemecahan satu unit Eselon III Bagian Pengadaan dan BMN menjadi dua unit Eselon III yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara di Biro Umum.

Untuk mewujudkan organisasi yang *agile*, fleksibel, dan kolaboratif yang berorientasi pada pengambilan keputusan yang cepat dan efektif serta perbaikan pelayanan publik, Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diharapkan seluruh Unit Kerja dapat mengimplementasikan penerapan SK tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama dalam penetapan SKP individu.

Di samping itu, penataan UPT Badan POM dilakukan dengan mengusulkan perubahan kriteria klasifikasi UPT Badan POM telah disampaikan kepada Kementerian PANRB dan terus berproses hingga triwulan pertama tahun 2022 dengan penyampaian surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-OT.01.02.2.22.02.22.175 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut Pembahasan Kriteria Klasifikasi UPT Badan POM.

2. Tata Laksana

a. Reviu Proses Bisnis Badan POM

Tinjau ulang proses bisnis telah dilaksanakan mulai bulan Januari - Maret 2022 disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja serta Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Tinjau ulang dilaksanakan meliputi 16 peta proses bisnis di lingkungan Badan POM. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan Unit Kerja Pusat dan perwakilan Balai Besar/Balai POM yang terkait. Hasil pembahasan diarahkan dengan merujuk pada prinsip SERA, yaitu penyederhanaan proses (*Simplification-S*), penghilangan proses yang tidak perlu (*Elimination-E*), pembuatan proses yang sama sekali baru (*Reengineering-R*), dan pengautomatisasian (*Automation-A*) akan disosialisasikan pada bulan April 2022.

b. Pelaksanaan Lelang Penyedia QMS Badan POM

Persiapan pengadaan surveilan ISO 9001:2015 Badan POM tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan mulai bulan Januari - Maret 2022 disesuaikan jumlah unit organisasi dan proses audit yang akan diterapkan. Persiapan pengadaan surveilan tersebut meliputi pembahasan proses audit, metode pengadaan dan pembuatan dokumen pengadaan. Pada pembahasan terkait pengadaan bersama dengan tim Inspektorat I dan tim UKPBJ Badan POM, juga melibatkan LKPP sebagai narasumber dilaksanakan secara daring pada tanggal 14 Februari 2022. Dokumen pengadaan yang dihasilkan telah disampaikan pada tim UKPBJ Badan POM pada tanggal 23 Maret 2022 melalui surat PPK nomor B-KU.22.221.03.22.98. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai bahan seleksi pengadaan jasa konsultasi Surveilans QMS ISO 9001:2015 Badan POM yang diumumkan melalui lpse.pom.go.id pada bulan April 2022.

c. Persiapan Pelaksanaan SPIP Terintegrasi

Persiapan pelaksanaan SPIP Terintegrasi tahun anggaran 2022 mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Persiapan antara lain pembahasan awal dengan Inspektorat II dalam bentuk diskusi untuk menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh BPKP untuk perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi di Badan POM yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 dan 28 Maret 2022. Selain itu juga dilakukan peningkatan kompetensi personel melalui Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bagi Kementerian/Lembaga Mitra Kedeputan Polhukam PMK BPKP yang diselenggarakan mulai tanggal 28 Maret s.d 1 April 2022. Dengan peningkatan kompetensi tersebut diharapkan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun

2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan SPIP.

X. Kerjasama Internasional

1. Partisipasi Badan POM pada EXPO 2020 Dubai

Badan POM telah menyelenggarakan *Badan POM Week* dalam *Expo 2020 Dubai* pada tanggal 25 Februari – 3 Maret 2022 di Paviliun Indonesia, Uni Emirat Arab. Partisipasi Badan POM pada *Expo 2020 Dubai* bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah RI dalam rangka memperluas ekspor produk Indonesia ke pasar global dan meningkatkan akses informasi produk Obat dan Makanan Indonesia di negara mitra tujuan ekspor. Partisipasi dalam *Expo 2020 Dubai* ini akan menjadi refleksi komitmen Badan POM untuk meningkatkan daya saing produk obat dan makanan Indonesia serta menarik investasi. Selain itu, Badan POM secara proaktif mengomunikasikan “**Healthy Life for a Better Future**” kepada masyarakat nasional maupun internasional dengan mengonsumsi Obat dan Makanan dari Indonesia yang khasiat, kualitas dan keamanannya telah terjamin oleh Badan POM. Untuk mendukung hal tersebut, Badan POM menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang terdiri dari Pameran Produk dan Konten Digital di *Rolling Exhibition*, *Business Forum* dan *Business Matching* Obat dan Makanan, dan Seminar “*Indonesian Government Policy to Support Investment in Food and Drug Sector Industry*”.

Pada area *Rolling Exhibition*, Badan POM menampilkan 218 produk Obat dan Makanan dari 42 perusahaan. Pada kesempatan tersebut, juga ditampilkan video profile Badan POM serta video promosi dari perusahaan Obat dan Makanan. Para pengunjung *Rolling Exhibition* antusias untuk memperoleh informasi terkait produk Indonesia, seperti kopi, bumbu masakan, obat tradisional, termasuk ketersediaan produk tersebut di pasar Timur Tengah.

Seminar mengenai “*Indonesian Government Policy to Support Investment in Food and Drug Sector Industry*” yang diselenggarakan secara *hybrid* bertujuan untuk memberikan informasi terkait fasilitasi dan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait investasi di bidang Obat dan Makanan serta dan mempromosikan iklim investasi di Indonesia yang merupakan salah satu upaya untuk menarik investasi asing ke Indonesia.





Penyelenggaraan *Business Forum* mengundang regulator mitra dari regulator pangan dari *Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)* Republik Turki, regulator obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dari PCIM-H India, TGA Australia dan NMPA RRT. Selain, pertukaran informasi terkait perizinan pemasukan produk antar regulator, Badan POM juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk bertanya langsung kepada regulator mengenai kebijakan, regulasi, standarisasi, dan hambatan yang akan

dihadapi ketika akan melakukan ekspor produk obat dan makanan ke negara Turki, Australia, India, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Penyelenggaraan *Business Matching* secara hybrid telah membuka peluang untuk menjalin kerja sama antara pelaku usaha Obat dan Makanan Indonesia dengan *potential buyer* di Uni Emirat Arab dan negara-negara *Gulf Cooperation Council (GCC) Countries* yang telah berkomunikasi pada kegiatan tersebut. Pada pertemuan, terdapat beberapa *prospect business deal* yang akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Obat dan Makanan.



2. **Follow Up Visit WHO National Regulatory Authority (NRA) Benchmarking**

Sebagai tindak lanjut *WHO NRA Benchmarking* pada tahun 2018, WHO melakukan *Institutional Development Plan (IDP) Follow Up Visit* kepada Badan POM pada tanggal 28 – 29 Maret 2022. Tujuan kunjungan WHO lainnya yaitu membahas dan merencanakan *re-benchmarking* yang dijadwalkan tahun 2023-2024, termasuk *interest* dan rencana *benchmarking* untuk **sistem regulatori obat**.

Pada *WHO NRA Benchmarking* sebelumnya tahun 2018, Badan POM meraih *maturity level* (level tertinggi: 4) pada level 3 dan beberapa fungsi mencapai level 4 (*Marketing Authorization, Vigilance, Laboratory Access and Lot release*) untuk **sistem regulatori vaksin** sesuai *Global Benchmarking Tool (GBT) assessment* oleh WHO. Hasil dari kegiatan *follow up visit* tersebut mendapatkan hasil memuaskan (*very exceptional*). WHO menyatakan bahwa Badan POM telah meningkatkan regulasi yang dimilikinya melalui peningkatan kekuatan

dasar hukum, perubahan struktur organisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan indikator kinerja, serta peningkatan level transparansi dan edukasi informasi kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, WHO juga memaparkan satu program baru terkait *Regulatory Strengthening System* (RSS) yaitu WHO *List Authority – WLA* (*background, WLA framework, operating principles, operational guidance, transitional arrangements* dan PEP termasuk *risk-based evaluation*). NRA yang telah masuk dalam WLA merupakan NRA dengan kinerja level tertinggi serta terpercaya dalam ranah regulasi dan suplai produk secara global. Dalam hal ini, Badan POM telah menunjukkan *expression of interest* untuk menjadi WLA. Diharapkan dengan menjadi WLA, akan membuka peluang obat dan vaksin produksi dalam negeri untuk bersaing di pasar global.

XI. Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan I ini sebanyak 404 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hadir menjadi bagian dari Badan POM yang terdiri dari 387 orang yang diterima melalui seleksi CPNS 2021 dan 17 orang dari Ikatan Dinas Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Seluruh CPNS tersebut telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta lokasi penempatan di lingkungan BPOM.

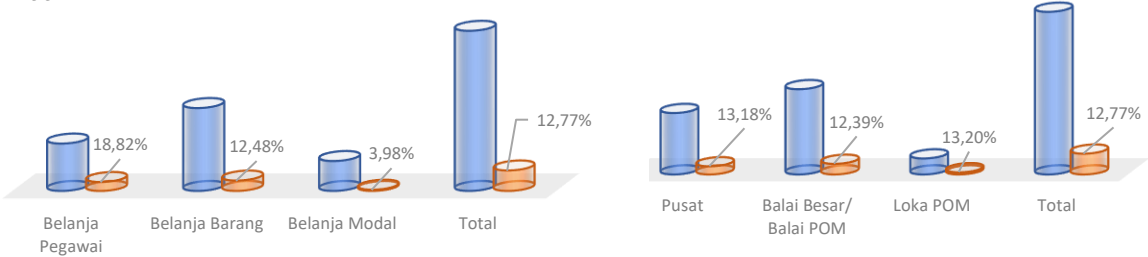
2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di BPOM. Aplikasi IDEAS memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS adalah webinar/diskusi *online* yang dapat diikuti oleh pegawai BPOM dengan narasumber yang berasal dari internal BPOM maupun eksternal. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat *online* di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>. Sampai bulan Maret 2022, jumlah pegawai BPOM yang sudah memanfaatkan aplikasi IDEAS melalui menu *Online Shopping Training*/Pelatihan Tidak Terjadwal sebanyak 1.529 peserta, Pelatihan Terjadwal sebanyak 9 peserta, Webinar/diskusi online sebanyak 1.295 peserta. Peserta yang lulus Pelatihan Tidak Terjadwal sebanyak 871 peserta, Pelatihan Terjadwal 4 peserta, dan Webinar/diskusi online 1.045 peserta. Pada bulan Maret, IDEAS sudah menambahkan fitur baru yaitu ujian *online* yang telah diikuti 410 peserta dengan nilai rata-rata *post test* 75,06.

BPOM juga memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Sampai dengan bulan Maret 2022, sebanyak 4.021 data/informasi/pengetahuan telah dikelola dalam aplikasi. Sebanyak 99 (dari 103) Unit Kerja telah melakukan *sharing knowledge* melalui Aplikasi Simphoni BPOM. Unit Kerja yang paling banyak mengunggah data/informasi/pengetahuan yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dengan jumlah publikasi sebanyak 71.

XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I 2022

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.244.003.351.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2022 sebesar Rp286.481.849.282,- (12,77%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp111.709.048.944,- ,realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp145.690.652.577,- ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp29.082.147.761,-.



Gambar 31. Realisasi Anggaran s.d Triwulan I 2022

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	847.326.628.000	111.709.048.944	13,18%
Balai Besar/ Balai POM	1.176.312.577.000	145.690.652.577	12,39%
Loka POM	220.364.146.000	29.082.147.761	13,20%
Total	2.244.003.351.000	286.481.849.282	12,77%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	663.407.606.000	1.161.412.457.000	419.183.288.000	2.244.003.351.000
Realisasi	124.846.683.850	144.941.849.928	16.693.315.504	286.481.849.282
	18,82%	12,48%	3,98%	12,77%

XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2022. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.

LAMPIRAN 1

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92,25	%	83,57	90,59
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83	%	89,03	107,27
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,5	%	82,23	92,92
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	77,5	%	88,14	113,73
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	%	82,74	92,97
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	68,19	74,93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	65	%	47,45	73,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	95,11	104,52
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	60	%	52,24	87,07
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	66	%	67,95	102,95
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,28	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	%	Progres 25,86%	
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93	Nilai	87,98	94,60
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	2.010	Sekolah	Progres 19,17%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	648	Desa	Progres 20,58%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	255	Pasar	Progres 19,62%	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	21,9	21,90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	21,43	21,43
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	73	%	23,11	31,66
		Indeks RB UPT	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP UPT	82	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium/GLP	81	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	Indeks	1,75	77,78
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5	Nilai	59,31	63,43
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	84	%	33,33	39,68
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	80	%	100,00	125,00
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	87,5	%	53,40	61,03

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	92	%	0	0,00
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	83,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	84,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	90	Nilai	75	83,33
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	80	%	83,33	104,16
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	80	%	92,86	116,08
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	80	%	66,67	83,34
		Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman	60	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Profil	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	80,8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,25	Indeks	1,25	55,56
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	90	Nilai	75	83,33
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	83	%	94,23	113,53

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	76	%	77,69	102,22
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	84	%	84,93	101,11
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	79	%	83,95	106,27
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	76	%	78,29	103,01
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100	106,38
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	62	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	90,75	100,83
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	85,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	82,75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2,26	Indeks	2,75	121,68

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	Nilai	84	84,85
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	57	%	45,6	80,00
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	13	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	58	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	77	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	89	%	90	101,12
		Persentase koordinasi Pengawasan Produksi Pangan fortifikasi yang dilaksanakan	80	%	16	20,00
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	85	%	92,59	108,93
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	89	%	100	112,36
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	4,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	2	88,89
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91	Nilai	75	82,42
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	%	71,02	81,63
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	%	71,59	82,29
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85	%	75,34	88,64
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87	%	90,24	103,72
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	83	%	68,08	82,02
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90	%	98,25	109,17
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	92	%	98,71	107,29
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,51	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	Nilai	75	75,00
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	77	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik distribusi obat	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	86	%	91,30	106,16
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	86	%	70,00	81,40
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	86	%	97,08	112,88
		Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	75	%	7,25	9,67
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2,26	Indeks	1,5	66,37
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	Nilai	10,04	11,41
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	48	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,51	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18.100	Permohonan	4.932	27,25
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	74	%	88,16	119,14
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	92,59	Nilai	93,44	100,92
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	74,42	106,31
		Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, dan NPP yang ditindaklanjuti	87	%	37,4	42,99

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60.400	Label dan Iklan	13.594	22,51
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	88,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas KMEIONAPPZA	98	Nilai	100	102,04
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	75	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	69	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	350	Sarana	352	100,57
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang dilakukan sesuai standar	94	%	99,2	105,53
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		peraturan peredaran pangan olahan yang baik				
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,51	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	67.000	Permohonan	17.764	26,51
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	93	Nilai	93	100,00
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	60	%	90,91	151,52
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat dan Obat High Risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	76	%	100,00	131,58
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	95	%	11,11	11,69
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	90	%	9,66	10,73
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	76	%	58,82	77,39

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produk Biologi dan Sarana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	75	%	71,43	95,24
		Indeks Pelayanan Publik	4,01	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	70	%	43,80	62,57
		Nilai RB Ditwas Produksi ONPP	93	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2,26	Indeks	2,5	110,62
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas Produksi ONPP	95	Nilai	95	100,00
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	%	61,25	68,06
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	95,62	100,65
		Persentase pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,41	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	%	50,75	56,39
		Persentase pendampingan di bidang Registrasi pangan olahan yang efektif	94	%	87,95	93,56

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2,26	Indeks	2,75	121,68
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98	Nilai	75	76,53
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89	%	54,1	60,79
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	76	%	50,77	66,80
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	76	%	81,83	107,67
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Obat	4,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	84	%	20	23,81
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100	100,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	88,9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2,25	Indeks	1,75	77,78

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	94	Nilai	75	79,79
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93,5	%	84,21	90,06
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praktek/Klinik dan DIP	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktek/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	82,5	%	94,29	114,29
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktek/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	74	%	74,54	100,73
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktek/ Klinik	4,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	82,5	%	92,24	111,81
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praktek/Klinik dan DIP yang efektif	77	%	51,78	67,25
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	85	%	86,02	101,20
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	87,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	86,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	97	Nilai	75	77,32
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai tahapan penyusunan	91	%	31	34,07
		Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	91	%	83,33	91,57
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95,25	%	100	104,99
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,75	Indeks	3	109,09
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	Nilai	95	95,00
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	93	%	21,11	22,70
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90	%	90,29	100,32
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	84	%	59	70,24
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	100	111,11
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	Nilai	75	75,00
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	89	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	89	%	46,87	52,66
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	87,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	Nilai	90	90,00
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan sesuai dengan pedoman	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	87,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	35	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	240	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	240	Fasilitator	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	322	Pemda	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	500	Kader	100	20,00
		Tingkat efektivitas KIE makanan	93,56	Nilai	92,36	98,72

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2,26	Indeks	2,75	121,68
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/ Pengujian	81	%	73,25	90,43
		Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM	20	%	7	35,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6	%	75,78	91,74
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	81,5	%	73	89,57
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	28	28,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	100	107,53
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	71	%	50	70,42
		Indeks RB PPPOMN	87,6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	78,7	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Status Akreditasi	71	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1	Nilai	67,04	71,24
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	68	%	2,5	3,68
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	82	%	2,94	3,59
		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	49	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian	60	%	33,33	55,55
		Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar	60	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	63,8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	2,26	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	90	Nilai	75	83,33
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	%	88,89	88,89
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset	94	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	78	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Riset Kajian Obat dan Makanan	78,1	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,3	Nilai	35,92	39,34
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK, dan Kosmetik	50	%	8,33	16,66
		Persentase Duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84	%	0,73	0,87

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	76	%	20	26,32
		Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	50	%	0	0,00
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat	60	%	0	0,00
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha	60	%	6,76	11,27
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard	95	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kosmetik yang sesuai standard	95	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	93,91	Nilai	94,3	100,42
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4,01	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	274	Komunitas	2	0,73
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	Nilai	12,71	12,84

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	83	%	81,43	98,11
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	78	%	59,48	76,26
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	83	%	92,25	111,14
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	88	%	92,57	105,19
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	76	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2,25	Indeks	0,75	33,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	89	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	33,21	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Opini	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	73,33	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	Nilai	70,53	75,43
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Media	74,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama yang efektif	86	%	21,74	25,28
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,99	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	%	20,32	23,63
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional, dan Multilateral	86	%	23,17	26,94
		Indeks kepuasan media	74,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,85	Indeks	3,83	99,48
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	Negara	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83	%	79,31	95,55
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	%	99,95	100,11
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	%	83,33	126,26
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95	%	97,01	102,12
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	78,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2,25	Indeks	2,75	122,22
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	Nilai	75	83,33
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,48	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,33	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95	Nilai	58,47	61,55
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,22	Nilai	88,61	93,06
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	%	25	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,82	Indeks	3,48	91,10
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	71,04	%	22,42	31,56
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	20,21	20,21
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	13,94	13,94

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83,5	%	92,92	111,28
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	74,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2,25	Indeks	2,5	111,11
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	95	95,00
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4,5	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7,41	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	5,47	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,76	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,75	Indeks	3,75	100,00
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	47,14	47,14
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4	%	99,28	99,88

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	94,37	Nilai	93	98,55
		Indeks Pelayanan Publik	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	86,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	85,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2,25	Indeks	2,75	122,22
		Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,5	Nilai	85	89,01
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5,59	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Sistem Merit	0,89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,44	Indeks	3,55	103,20
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	92	%	99,86	108,54
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,06	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	72	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro SDM	83,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	Nilai	75	75,00
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	79	%	72,5	91,77
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	875	Orang	186	21,26
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	4,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	60	%	23,7	39,50
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	82	Kerjasama	33	40,24
		Nilai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,45	Nilai	4,62	103,82
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	92	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	50	%	25	50,00
		Nilai kepuasan Layanan PFM	4	Nilai	4,5	112,50
		Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	88	Rencana Aksi	20,83	23,67
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	82	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal	2,26	Indeks	2,75	121,68
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	93,5	Nilai	73,23	78,32

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSPDM POM	94	Nilai	75	79,79
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	95	%	99,56	104,80
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	31	%	26,2	84,52
		Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time)	3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	90	%	12,3	13,67
		Jumlah Data Berbagi Pakai	15	Data	3	20,00
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	26,09	26,09
		Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	70	%	53,1	75,86
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	38,46	38,46
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84,4	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	78	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	50	%	27,7	55,40
		Sertifikasi ISO 27001	1	Sertifikat	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93,6	Nilai	57,97	61,93
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai rata-rata Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit Kerja di Wilayah Inspektorat I	3,4	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat I	0,99	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	85,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	20,68	20,68
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	94	%	79,31	84,37
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100	%	25	25,00
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	98,57	105,99
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Inspektorat I	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	Indeks	70,38	83,07
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	90	Nilai	75	83,33
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II	8,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai rata-rata Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit Kerja di Wilayah Inspektorat II	4	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	0,99	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	94	%	85,27	90,71

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100	%	100	100,00
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat II	85,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86	Indeks	67,94	79,00
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,25	Indeks	2,5	111,11
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	90	Nilai	75	83,33
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	91	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Aset	2,93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	%	30,49	30,49
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	88	%	12	13,64

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	50	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	86	%	88,27	102,64
		Indeks RB Biro Umum	83,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum	2,25	Indeks	2	88,89
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	90	Nilai	75	83,33

LAMPIRAN 2

**SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2022
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(PER 31 MARET 2022)**

A. UNIT PUSAT

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	398.971.988.000	58.786.169.588	14,73%
1.1	BIRO KERJASAMA	15.608.438.000	869.807.399	5,57%
1.2	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	22.298.642.000	3.437.090.809	15,41%
1.3	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	14.408.276.000	1.958.412.675	13,59%
1.4	BIRO UMUM	165.256.790.000	19.606.204.618	11,86%
1.5	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	181.399.842.000	32.933.335.125	18,16%
2	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	52.328.994.000	5.865.661.542	11,21%
2.1	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	8.153.558.000	818.668.832	10,04%
2.2	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	11.765.547.000	915.678.825	7,78%
2.3	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	11.306.322.000	1.152.962.272	10,20%
2.4	DIT. REGISTRASI OBAT	11.610.084.000	1.810.771.017	15,60%
2.5	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	9.493.483.000	1.167.580.596	12,30%
3	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	50.004.587.000	7.949.081.123	15,90%
3.1	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	11.274.111.000	1.601.288.789	14,20%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
3.2	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	9.287.950.000	847.627.190	9,13%
3.3	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	10.400.772.000	2.179.348.723	20,95%
3.4	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6.798.182.000	1.790.828.680	26,34%
3.5	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	12.243.572.000	1.529.987.741	12,50%
4	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	58.694.540.000	5.707.353.696	9,72%
4.1	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	14.850.000.000	1.096.430.750	7,38%
4.2	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	12.834.540.000	1.245.144.554	9,70%
4.3	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.568.000.000	1.098.792.036	12,82%
4.4	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	8.442.000.000	1.257.078.971	14,89%
4.5	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	14.000.000.000	1.009.907.385	7,21%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	44.708.170.000	5.557.020.083	12,43%
5.1	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	19.629.793.000	2.229.218.602	11,36%
5.2	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	7.482.810.000	1.012.370.659	13,53%
5.3	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	7.783.087.000	940.759.110	12,09%
5.4	DIT. CEGAH TANGKAL	9.812.480.000	1.374.671.712	14,01%
6	INSPEKTORAT UTAMA	26.901.038.000	3.353.524.342	12,47%
6.1	INSPEKTORAT I	19.865.993.000	2.877.479.425	14,48%
6.2	INSPEKTORAT II	7.035.045.000	476.044.917	6,77%
7	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	85.957.671.000	10.349.958.429	12,04%
8	PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	24.027.920.000	2.363.020.403	9,83%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
9	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	54.629.529.000	6.069.335.074	11,11%
10	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	51.102.191.000	5.707.924.664	11,17%
	TOTAL SATKER PUSAT	847.326.628.000	111.709.048.944	13,18%

B. BALAI BESAR / BALAI POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	PALEMBANG	30.567.108.000	6.238.530.641	20,41%
2	MANADO	32.068.897.000	5.327.184.008	16,61%
3	MATARAM	29.577.280.000	3.783.712.711	12,79%
4	AMBON	23.670.173.000	3.413.975.844	14,42%
5	BANDA ACEH	25.436.317.000	3.586.865.490	14,10%
6	GORONTALO	19.986.593.000	2.793.957.017	13,98%
7	SEMARANG	56.702.377.000	7.856.475.403	13,86%
8	BENGKULU	28.666.120.000	4.196.496.423	14,64%
9	DI SERANG	28.226.462.000	4.274.907.530	15,15%
10	PEKAN BARU	35.553.360.000	5.386.900.139	15,15%
11	SURABAYA	56.083.984.000	7.895.838.114	14,08%
12	JAKARTA	45.606.169.000	5.811.992.442	12,74%
13	DENPASAR	42.928.388.000	5.144.354.870	11,98%
14	YOGYAKARTA	40.612.643.000	5.332.151.914	13,13%
15	MEDAN	48.138.392.000	5.779.750.602	12,01%
16	KUPANG	34.488.493.000	4.646.639.792	13,47%
17	JAYAPURA	28.778.331.000	4.163.953.862	14,47%
18	BANDUNG	59.824.775.000	7.055.498.628	11,79%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
19	JAMBI	30.049.821.000	3.961.142.544	13,18%
20	BANDAR LAMPUNG	34.513.577.000	4.144.224.061	12,01%
21	PALU	25.894.138.000	2.921.726.219	11,28%
22	PONTIANAK	26.713.626.000	3.018.306.863	11,30%
23	PANGKAL PINANG	20.982.118.000	2.608.990.305	12,43%
24	KENDARI	33.472.032.000	3.582.509.319	10,70%
25	MAKASSAR	56.353.243.000	6.616.439.159	11,74%
26	SOFIFI	18.341.627.000	1.832.896.165	9,99%
27	PALANGKARAYA	28.070.532.000	3.389.607.164	12,08%
28	PADANG	44.205.815.000	4.695.954.785	10,62%
29	BATAM	31.729.289.000	2.825.464.603	8,90%
30	SAMARINDA	32.711.174.000	3.655.774.544	11,18%
31	MAMUJU	22.014.685.000	1.890.709.603	8,59%
32	MANOKWARI	34.220.650.000	2.350.316.832	6,87%
33	TARAKAN	7.911.548.000	1.736.085.847	21,94%
34	BANJARMASIN	62.212.840.000	3.771.319.134	6,06%
	TOTAL SATKER BALAI	1.176.312.577.000	145.690.652.577	12,39%

C. LOKA POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	KABUPATEN JEMBER	4.059.282.000	758.300.109	18,68%
2	KABUPATEN BANYUMAS	5.040.938.000	1.172.800.308	23,27%
3	KOTA PALOPO	5.018.555.000	953.785.044	19,01%
4	KABUPATEN BOGOR	4.903.984.000	1.265.168.287	25,80%
5	KABUPATEN TANGERANG	4.763.976.000	818.648.306	17,18%
6	KOTA DUMAI	5.091.155.000	1.067.878.355	20,98%
7	KOTA BAUBAU	5.645.698.000	807.460.236	14,30%
8	KOTA LUBUKLINGGAU	4.405.499.000	761.949.434	17,30%
9	KABUPATEN MIMIKA	5.060.227.000	741.378.019	14,65%
10	KABUPATEN ENDE	5.447.310.000	841.906.176	15,46%
11	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	13.004.797.000	771.732.149	5,93%
12	KOTA SURAKARTA	5.296.346.000	948.138.170	17,90%
13	KOTA TASIKMALAYA	6.096.857.000	1.007.743.464	16,53%
14	KABUPATEN KEDIRI	4.246.735.000	708.009.618	16,67%
15	KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.491.105.000	760.360.791	21,78%
16	ACEH TENGAH	6.837.833.000	609.030.575	8,91%
17	KOTA TANJUNGBALAI	3.602.828.000	472.473.034	13,11%
18	KOTA PAYAKUMBUH	6.734.168.000	871.563.592	12,94%
19	KOTA SUNGAI PENUH	4.034.348.000	743.919.725	18,44%
20	KABUPATEN TULANGBAWANG	4.780.480.000	575.963.563	12,05%
21	KABUPATEN SANGGAU	3.869.372.000	713.313.559	18,43%
22	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	4.182.867.000	952.112.044	22,76%
23	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	3.862.670.000	628.484.845	16,27%
24	KOTA BALIKPAPAN	4.226.588.000	711.686.786	16,84%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
25	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	4.484.194.000	477.526.476	10,65%
26	KABUPATEN BANGGAI	3.603.510.000	551.936.693	15,32%
27	KABUPATEN BULELENG	28.367.142.000	705.605.561	2,49%
28	KABUPATEN BIMA	4.244.097.000	542.590.506	12,78%
29	KABUPATEN MERAUKE	3.690.198.000	446.673.120	12,10%
30	KABUPATEN REJANG LEBONG	9.814.574.000	575.084.874	5,86%
31	KOTA TANJUNGPINANG	4.516.592.000	648.484.447	14,36%
32	KABUPATEN BELITUNG	3.625.292.000	696.408.707	19,21%
33	KABUPATEN SORONG	5.423.941.000	968.980.862	17,86%
34	ACEH SELATAN	7.671.026.000	700.788.969	9,14%
35	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.171.920.000	352.845.555	8,46%
36	KABUPATEN DHARMASRAYA	3.834.648.000	584.475.750	15,24%
37	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	4.678.700.000	1.035.516.732	22,13%
38	KABUPATEN TANAH BUMBU	3.748.220.000	647.373.499	17,27%
39	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.786.474.000	484.049.821	10,11%
	TOTAL SATKER LOKA	220.364.146.000	29.082.147.761	13,20%
	TOTAL SELURUH SATKER	2.244.003.351.000	286.500.530.320	12,77%





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2022



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI